

DETERMINASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS): PERAN PARTISIPASI STAKEHOLDER, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS

Khintania Salsabila Putri Shardi¹, Yulia Fitri²

Universitas Syiah Kuala^{1,2}

Email: kintania.salsa08@gmail.com¹, Yfitri.fekon@usk.ac.id²

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 9 Bulan : September Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<i>This study aims to examine the influence of stakeholder participation, transparency, and accountability on the effectiveness of managing the School Operational Assistance (BOS) funds in junior high schools in Aceh Barat Daya Regency. The population of this research includes all 24 junior high schools, with a total sample of 96 respondents consisting of principals, treasurers, school committee members, and teachers selected through purposive sampling. Primary data were collected using a questionnaire measured on a Likert scale of 1 to 5. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS. The results indicate that stakeholder participation, transparency, and accountability simultaneously have a significant effect on the effectiveness of BOS fund management. Partially, transparency and accountability have a significant effect, while stakeholder participation does not show a significant effect on the effectiveness of BOS fund management. The coefficient of determination (R^2) of 0.267 indicates that 26.7% of the variation in the effectiveness of BOS fund management can be explained by the three independent variables, while the remaining percentage is influenced by other factors not examined in this study.</i> Keyword: Stakeholder Participation, Transparency, Accountability, Effectiveness of BOS Fund Management.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi penting bagi pembentukan sebuah bangsa, sebagaimana tercermin dalam hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dilindungi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk membantu sekolah meniadakan biaya pendidikan bagi anak-anak miskin merupakan salah satu inisiatif penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia (Ayu et al., 2021). Nilai-nilai pemerataan, akuntabilitas, dan transparansi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 dan 17 Tahun 2003 juga ditekankan dalam program ini.

Namun, kasus-kasus korupsi dalam pengelolaan dana BOS sering terjadi, seperti di SMP Negeri 1 Dolok Silau dan SMP Negeri 1 Reok, yang menunjukkan kelemahan dalam mekanisme pengawasan dana BOS. Pada kasus di SMP Negeri 1 Dolok Silau, Sumatera Utara,

kepala sekolah menggunakan dana BOS sebesar Rp214 juta pada tahun 2019 untuk keperluan pribadi. Kasus ini terungkap pada 5 Oktober 2021 dan menyebabkan kerugian pada APBN (Purnomo, 2021).

Pada 2 Juli 2021, Kejaksaan Negeri Manggarai menetapkan kepala sekolah dan bendahara SMP Negeri 1 Reok, NTT, sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan dana BOS dari tahun 2017 hingga 2020, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.839.401.569. (Bere, 2021). Widodo dan Muhammad Faisal dari SMK Negeri 53 Jakarta disita selama 20 hari di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, atas dugaan korupsi dana BOS dan BOP pada tahun 2018. Mereka diduga menggelapkan sekitar Rp.2,3 miliar dari keseluruhan dana Rp.7,8 miliar (Laksono & Putro, 2021). Fenomena ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam pengelolaan dana BOS agar lebih efektif.

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana BOS antara lain partisipasi pemangku kepentingan, transparansi, dan akuntabilitas. Keterlibatan aktif pemangku kepentingan terbukti dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Transparansi penting dalam memastikan penggunaan dana yang tepat dan membangun kepercayaan publik, sementara akuntabilitas mengharuskan sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan pencapaian hasil pendidikan. Berbagai studi menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dapat mempengaruhi pencapaian pengelolaan dana BOS, meskipun hasilnya masih bervariasi.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* dalam akuntansi menekankan tanggung jawab manajerial untuk mengelola aset perusahaan demi kepentingan pemilik atau prinsipal (Syahara et al., 2024). Dalam konteks ini, manajer atau agen diharapkan untuk bertindak demi kepentingan organisasi, bukan tujuan pribadi. *Stewardship* mengasumsikan bahwa perilaku manajer selaras dengan tujuan organisasi, menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan hubungan baik antara manajer dan pemilik (Donaldson & Davis, 1991).

Dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), prinsip-prinsip *Stewardship* relevan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Manajerial: Kepala sekolah dan staf administrasi harus mengelola dana BOS dengan efisien dan transparan.

2. Kepercayaan dan Transparansi: Sekolah perlu menjaga kepercayaan dengan memberikan informasi terbuka tentang penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa dan pemerintah.
3. Pembangunan Hubungan yang Baik: Hubungan yang serasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah penting untuk memastikan dana BOS digunakan secara efektif.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pengelolaan dana BOS diharapkan menjadi lebih efektif, transparan, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Efektivitas Pengelolaan Dana BOS

Efektivitas mengacu pada Tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pelaksanaannya, efektivitas didefinisikan sebagai berikut: perencanaan, alokasi, penggunaan, pengawasan dan ketepatan serta transparansi informasi. Kusumawati (2023) menyatakan bahwa efektivitas diukur dengan bantuan seberapa dekat hasil memenuhi tujuan yang diinginkan. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2021, pengguna BOS harus menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Makmur (2011) menjelaskan bahwa efektivitas dicapai melalui ketepatan waktu, biaya, program, serta tujuan. Pengelolaan dana BOS yang efektif mencakup perencanaan matang, alokasi dana sesuai kebutuhan, penggunaan dana yang tepat, pengawasan ketat dan evaluasi berkala (Nupus, 2021). Dengan demikian, pengelolaan yang efektif dan transparan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah.

H₁: Partisipasi *stakeholder*, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Partisipasi Stakeholder

Partisipasi *Stakeholder* merupakan hak dan tanggung jawab individu atau kelompok dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan kelompok atau organisasi. Rakhmawati (2018) mendefinisikan partisipasi sebagai hak individu untuk mengambil elemen, baik sekaligus atau tidak langsung, dalam metode pengambilan keputusan. Ada berbagai jenis partisipasi, termasuk partisipasi aktif, konsultasi, dan katalisasi perubahan.

Stakeholder adalah orang atau kelompok yang dapat memengaruhi atau didorong oleh suatu korporasi dan mempunyai kepentingan di dalamnya. keputusan dan tindakan organisasi (Aulia, 2016). *Stakeholder* internal dalam konteks pendidikan meliputi siswa, orang tua, guru, kepala sekolah, staf administrasi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

(Azkia, 2023). Mereka memiliki peran dan kepentingan yang berbeda, mulai dari kualitas pendidikan hingga pengelolaan sekolah.

Indikator partisipasi *stakeholder* menurut Rakhmawati (2018) meliputi:

1. Pemberi pertimbangan: *stakeholder*, terutama komite sekolah, memberikan saran dan pendapat dalam pengambilan keputusan.
2. Pendukung: komite sekolah memantau kondisi pendidikan dan mengoordinasikan sumber daya untuk mendukung kegiatan sekolah.
3. Pengontrol: komite sekolah mengawasi pelaksanaan program dan memastikan kesesuaian dengan kebijakan.
4. Mediator: komite sekolah bertindak sebagai penghubung antara sekolah, pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi keluhan dan masalah yang muncul.

Partisipasi yang efektif dari *stakeholder* internal sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan pendidikan di sekolah.

H₂: Partisipasi *stakeholder* berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Transparansi

Transparansi merujuk pada kejelasan, keterbukaan dan ketelitian dalam penyediaan informasi kepada publik mengenai keputusan, kebijakan dan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah atau lembaga, termasuk sekolah (Viktoria, 2014). Prinsip ini memungkinkan akses yang mudah bagi *stakeholder* untuk mendapatkan informasi yang relevan, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah (Susanti, 2019).

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah melalui beberapa indikator, antara lain:

1. Kejelasan informasi: informasi harus disampaikan dengan jelas agar mudah dipahami.
2. Tepat waktu: laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu agar mendukung pengambilan keputusan.
3. Memadai: informasi harus sama dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
4. Dapat dibandingkan: laporan harus dapat dibandingkan antarperiode atau dengan institusi lain yang sejenis.
5. Aksesibilitas: informasi harus mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

Selain transparansi, akuntabilitas juga merupakan konsep penting dalam pengelolaan sekolah.

H₃: Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab lembaga untuk menyajikan informasi dengan mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang diambil (Viktoria, 2014). Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Kelompok Pemerintah secara Keseluruhan berpendapat bahwa akuntabilitas kinerja adalah kewajiban yang ditempatkan pada pemerintah mempertanggungjawabkan pemenuhan atau kegagalan operasi yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan.

Menurut Mahmudi (2011), indikator keberhasilan transparansi yang terkait dengan akuntabilitas mencakup:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran: ketaatan pada hukum dan perilaku jujur dalam pengelolaan dana publik.
2. Akuntabilitas manajerial: efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan organisasi.
3. Akuntabilitas program: dalam pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan program dengan biaya minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan: dalam pertanggungjawaban atas dampak kebijakan yang diambil.
5. Akuntabilitas finansial: penggunaan dana publik secara efisien dan efektif.

Transparansi dan akuntabilitas di sekolah bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan.

H₄: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang difokuskan pada kerangka berpikir mahasiswa pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Provinsi Aceh Barat Daya yang mendapatkan dana dari Dana Operasional Sekolah (BOS). Penelitian ini membahas tentang partisipasi pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas terkait efektivitas pengembalian pinjaman dan BOS. Dengan menggunakan desain penelitian dari Sekaran dan Bougie (2017), penelitian ini memiliki tujuan kausalitas, tingkat intervensi minimal, situasi studi yang direncanakan, unit analisis berupa sekolah dan horizon waktu yang bersifat cross-

sectional.

Unit analisis pada penelitian ini adalah Sekolah yaitu pada Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Barat Daya. Populasi di dalam penelitian ini yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 9 kecamatan yang memiliki jumlah SMPN yang berbeda-beda di setiap kecamatannya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Populasi dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Aceh Barat Daya yang berjumlah 24 Sekolah. Setiap sekolah ada 4 (empat) responden yang akan dijadikan sampel, yaitu: kepala sekolah, bendahara, komite sekolah dan guru sekolah, dengan total 96 orang.

Penelitian ini menggunakan variabel partipasi stakeholder, transparansi dan akuntabilitas sebagai variabel bebas dan menggunakan variabel efektivitas pengelolaan dana BOS sebagai variabel terikat. Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber	Skala
Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sejauh mana pengelolaan tersebut mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, akurat, dalam perhitungan biaya, bijak dalam menentukan pilihan, cermat dalam berpikir dan efisien dalam mencapai hasil yang diharapkan (Tuheteri et al., 2022)	1. Ketepatan penentuan waktu. 2. Ketepatan perhitungan biaya. 3. Ketepatan dalam menentukan pilihan. 4. Ketepatan berpikir. 5. Ketepatan dalam menentukan perintah. 6. Ketepatan dalam menentukan tujuan. 7. Ketepatan sasaran.	Makmur (2011)	Likert

Tabel 1-Lanjutan

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber	Skala
Variabel Independen:				
1. Partisipasi Stakeholder	Partipasi stakeholder mengacu pada keikutsertaan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan, sebagai pendukung dan mediator yang mengontrol antara pemerintah dan masyarakat (Rakhmawati, 2018).	1. Sebagai pemberi pertimbangan. 2. Pendukung. 3. Pengontrol. 4. Mediator antara pemerintah dan masyarakat di satuan pendidikan.	Rakhmawati (2018)	Likert
2. Transparansi	Keterbukaan (<i>open proses</i>) pihak sekolah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan dana BOS kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2009).	1. Jelas. 2. Tepat waktu. 3. Memadai. 4. Dapat dibandingkan. 5. Mudah diakses. 6. Kondisi keuangan. 7. Bentuk perencanaan dan hasil kegiatan. 8. Adanya kerangka kerja hukum bagi transparansi.	Mardiasmo (2009)	Likert
3. Akuntabilitas	Akuntabilitas adalah tanggung jawab yang harus dilakukan individu atau organisasi untuk menjalankan tugasnya dengan kejujuran, efisiensi, keefektifan, kesesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan (Mahmudi, 2013).	1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran. 2. Akuntabilitas manajerial. 3. Akuntabilitas program. 4. Akuntabilitas kebijakan. 5. Akuntabilitas finansial.	Mahmudi (2013)	Likert

Data primer didapatkan melalui kuesioner yang diserahkan ke seluruh SMP di Kabupaten Aceh Barat Daya penggunaan teknik pengambilan sampel jenuh. lebih dari satu regresi linier adalah pendekatan analitis yang digunakan, dan untuk memastikan catatan yang sah dan jujur, pengujian informasi yang baik mencakup uji validitas dan reliabilitas serta pemeriksaan asumsi klasik. Pemeriksaan spekulasi dilakukan di samping uji t parsial dan uji F secara bersamaan. Tingkat pengaruh faktor independen terhadap variabel dasar ditentukan melalui uji koefisien determinasi (R^2).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = efektivitas pengelolaan dana BOS

α = koefisien konstanta

β = koefisien regresi

X_1 = partisipasi stakeholder

X_2 = transparansi

X_3 = akuntabilitas

e = error

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Karakteristik Responden Penelitian

Data penelitian ini menggunakan jawaban dari responden yang telah disebarkan menggunakan kuesioner berupa angket yang secara langsung ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Aceh Barat Daya. Berikut merupakan rincian penyebaran kuesionernya.

Tabel 2. Sebaran Kuesioner

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Sekolah	24
2	Bendahara	24
3	Komite Sekolah	24
4	Guru Sekolah	24
Total		96

Dari tabel tersebut diperoleh sebaran kuesioner merata sebanyak 4 orang dari masing-masing Kabupaten Aceh Barat memiliki 24 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan jumlah responden 96 orang. Pengelompokan karakteristik peserta tes berdasarkan jenis kelamin ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Gender

No.	Jabatan Responden	Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Sekolah	15	9
2	Bendahara	6	18
3	Komite Sekolah	20	4
4	Guru Sekolah	10	14
Total		51	45

Berdasarkan Tabel 3 disimpulkan bahwa kepala sekolah dengan gender laki-laki sebanyak 62,5 persen dan perempuan sebanyak 37,5 persen. Selanjutnya pada jabatan bendahara laki-laki cenderung lebih sedikit hanya 25 persen saja dan didominasi oleh perempuan yaitu 75 persen. Berbanding terbalik dengan komite sekolah yang mana hampir sebagian besar dengan gender pria yaitu sebesar 83,3 persen dan hanya 16,7 persen untuk perempuan. Lalu pada jabatan guru sekolah, guru dengan gender pria hanya sebesar 41,7 persen dan wanita sebesar 58,3 persen.

Hasil Uji Validitas

Dengan menggunakan 96 responden diperoleh r-tabel sebesar 0,200. Jika nilai r-hitung > r-tabel, maka pernyataan dinyatakan valid. Objek pernyataan dalam kuesioner, yang meliputi variabel Tanggung Jawab, Partisipasi Pemangku Kepentingan, Transparansi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Fakultas, memiliki nilai r hitung

yang lebih baik daripada nilai r tabel. Objek tersebut dinilai salah karena terdapat pengecualian pada objek X3, yaitu poin keempat, yang mana nilai r yang diharapkan lebih kecil daripada nilai r -tabel. Oleh karena itu, item tersebut akan dihapus sebelum dilakukan pengolahan data lebih lanjut, sementara seluruh item lainnya dinyatakan memenuhi validitas data.

Hasil Uji Reliabilitas

Penelitian ini melibatkan 42 item pernyataan kuesioner yang diuji reliabilitasnya dengan kriteria pengambilan Kemauan adalah bahwa statistik dianggap kredibel jika harga Cronbach Alpha melebihi 0,60. Semua item pernyataan dianggap memenuhi standar keandalan statistik karena nilai Cronbach Alpha semuanya lebih dari 0,60.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan Normal Probability Plot. Plot kemungkinan normal menunjukkan bagaimana informasi didistribusikan melintasi garis diagonal dan bergerak dalam rute tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi melalui model regresi.

Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factor (VIF) dan tingkat toleransi diuji pada uji multikolinearitas ini. Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel di bawah, nilai toleransi minimal adalah 0,1 dan nilai VIF untuk setiap variabel tidak lebih dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan. Analisis Multikolinearitas memperlihatkan bahwa model regresi tidak terpengaruh oleh masalah ini. Setiap variabel mempunyai nilai toleransi lebih banyak dari 10%, dan nilai VIF kurang dari 10. Hasil ini mengindikasikan tidak adanya korelasi yang sangat tinggi antara variabel-variabel independen, sehingga tidak mengganggu estimasi koefisien regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan visualisasi residual pada gambar, dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak ada heteroskedastisitas. Persebaran titik-titik data yang acak di sekitar nilai nol mengindikasikan bahwa varians dari error (residual) adalah konstan untuk semua nilai prediksi. Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terdapat pola heteroskedastisitas yang signifikan. Titik-titik data menyebar secara random di sekitar garis nol, tanpa adanya pola berbentuk corong atau pola lain yang mengindikasikan adanya perubahan varians error. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Kemanjuran pengelolaan dana BOS dianggap sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pemangku kepentingan, keterbukaan dan akuntabilitas. Studi ini menyelidiki gagasan tersebut.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	26.823	6.576		4.079	.000
1 X1	.139	.129	.109	1.071	.287
X2	.424	.089	.477	4.743	.000
X3	.042	.108	.035	.385	.701

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan temuan analisis regresi lebih dari satu pada Tabel 4 di atas, diperoleh persamaan lebih dari satu garis regresi linier sebagai berikut:

$$Y = 26.823 + 0,139X1 + 0,424X2 + 0,042X3$$

Persamaan regresi dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Jika partisipasi, transparansi, dan tanggung jawab pemangku kepentingan tetap atau bernilai 0, biaya keberhasilan pengelolaan Dana Bantuan Operasional perguruan tinggi (BOS) yang lebih baik adalah 26.823.
- 2) Koefisien regresi untuk Partisipasi Pemangku Kepentingan adalah nol.139, menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi pemangku kepentingan sebesar 1% meningkatkan efektivitas pengendalian Dana BOS hingga nol.139, dengan asumsi variabel transparansi dan tanggung jawab hukum konstan atau memiliki biaya nol.
- 3) Koefisien regresi sebesar 0,424 menunjukkan bahwa peningkatan variabel transparansi sebesar 1% akan meningkatkan efektivitas pengendalian Dana BOS dengan bantuan sebesar 0,424, dengan asumsi Partisipasi Pemangku Kepentingan dan liabilitas tetap nol.
- 4) Variabel responsibility memiliki koefisien regresi sebesar 0, yang menunjukkan bahwa peningkatan duty sebesar 1% meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana BOS sebesar 0,042

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Penggunaan koefisien determinasi, evaluasi ini melihat pada bagaimana unsur-unsur yang tidak memihak mempengaruhi variabel dependen. Nilai R square yang disesuaikan adalah 0,263. Hal ini memperlihatkan bahwa dari variabel-variabel yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap versi dalam variabel dasar, Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya dipengaruhi oleh 26,3% variabel yang terkait

dengan partisipasi pemangku kepentingan, transparansi, dan akuntabilitas; sedangkan sisanya 73,7% dipengaruhi oleh atau dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Hasil Uji Simultan (F)

Hasil penelitian yang menguji variabel Tanggung Jawab, Transparansi dan Partisipasi Pemangku Kepentingan. Nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari ambang batas $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektivitas pengendalian Anggaran Bantuan Operasional (BOS) Fakultas dipengaruhi oleh adanya Partisipasi Stakeholder, Transparansi dan Tanggung Jawab, sehingga H01 ditolak sedangkan Ha1 diterima.

Hasil Uji Parsial (T)

Dapat disimpulkan bahwa variabel independen memengaruhi variabel terstruktur jika biaya signifikansi kurang dari 0,05. Hasil berikut diperoleh sesuai dengan hasil uji parsial yaitu:

- 1) Partisipasi Pemangku Kepentingan: H02 diterima dan Ha2 ditolak karena nilai signifikansi sebesar 0,287 menunjukkan bahwa Partisipasi Pemangku Kepentingan tidak berdampak parsial terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- 2) Transparansi: H03 ditolak dan Ha3 diterima karena nilai signifikansi sebesar 0,000 memperlihatkan bahwa transparansi berdampak luas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS.
- 3) Kewajiban: H04 diterima dan Ha4 ditolak karena nilai signifikansi sebesar 0,701 menunjukkan bahwa kewajiban tidak memiliki pengaruh parsial kepada Efektivitas Pengelolaan Dana BOS.

Pengaruh Partisipasi Stakeholder, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dengan nilai kepentingan sebesar 0,000, yaitu temuan uji F menunjukkan bahwa unsur-unsur imparsial seperti tanggung jawab, keterbukaan dan keterlibatan pemangku kepentingan mempunyai dampak yang besar terhadap seberapa baik anggaran bantuan operasional dikelola untuk lembaga pendidikan tinggi, dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini mendukung hipotesis pengujian, yang menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut bekerja sama untuk memengaruhi seberapa baik pengelolaan BOS.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,263 memperlihatkan bahwa 26,3% variasi dalam efektivitas pengelolaan BOS dapat dijelaskan oleh Partisipasi Stakeholder,

Transparansi dan Akuntabilitas. Sementara itu, lebihnya sebesar 73,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model analisis ini.

Pengaruh Partisipasi Stakeholder terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikansi untuk variabel X1 (Partisipasi Stakeholder) adalah 0,287, yang lebih dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa Partisipasi Stakeholder tidak berdampak signifikan kepada Efektivitas Pengelolaan Dana BOS.

Teori stewardship menjelaskan bahwa manajer atau pengelola tidak hanya bertindak sebagai agen bagi pemegang saham, tapi juga bertanggung jawab untuk urusan organisasi dan semua pihak terkait. Dalam konteks pengelolaan BOS, teori ini mengindikasikan bahwa kepala sekolah mungkin lebih fokus pada tanggung jawab dan kepentingan organisasi secara keseluruhan daripada hanya pada efektivitas pengelolaan dana. Dengan demikian, jika penelitian memperlihatkan bahwa partisipasi stakeholder tidak mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana BOS, hal ini bisa berarti bahwa kepala sekolah lebih memprioritaskan tanggung jawab terhadap semua pihak terkait daripada aspek partisipasi individu. Temuan ini sesuai dengan penelitian Prasetyowati (2019) yang juga menemukan bahwa partisipasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS.

Pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikansi untuk variabel X2 (Transparansi) adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS.

Teori stewardship menekankan pentingnya hubungan saling percaya antara pengelola dan stakeholders, di mana pengelola bertindak sebagai steward yang bertanggung jawab mengelola sumber daya untuk kepentingan bersama. Transparansi yang disertai komunikasi efektif dan partisipasi memadai dapat memperkuat hubungan ini. Stakeholders yang merasa terlibat dan mendapatkan informasi yang jelas akan lebih bertanggung jawab dan terlibat dalam proses pengelolaan. Transparansi yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas dan mempermudah pengambilan keputusan yang tepat, serta memperkuat kepercayaan stakeholders terhadap pengelola. Ini sesuai dengan prinsip stewardship yang mengedepankan kolaborasi dan kepercayaan (Widyatmoko, 2017).

Tinjauan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian dana tidak diragukan lagi dipengaruhi oleh transparansi dalam pengelolaan keuangan BOS di SMP Aceh Barat Daya.

Akuntabilitas yang diperluas dan catatan yang bersih merupakan dua tujuan transparansi, yang membantu pemahaman dan keputusan pengelolaan dana yang cerdas. Hal ini konsisten dengan penelitian melalui Putra dan Suryanawa (2021) yang menunjukkan bahwa transparansi memiliki dampak yang baik dan besar pada pengendalian dana BOS, dan Trisnawati (2019) yang menemukan bahwa transparansi berdampak pada pengendalian keuangan madrasah.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel X3 memiliki tingkat kepentingan sebesar 0,701, yang lebih baik dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa bea memiliki pengaruh yang kecil terhadap efektivitas pengendalian Dana BOS.

Teori Stewardship berasumsi bahwa manajer, dalam hal ini pengelola sekolah, memiliki kepentingann tinggi terhadap organisasi dan bertindak demi kepentingan jangka panjang organisasi, bukan hanya untuk imbalan pribadi atau finansial. Jika akuntabilitas tidak mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana BOS, ini mungkin menunjukkan bahwa pengelola lebih fokus pada tujuan jangka panjang dan kesejahteraan siswa daripada hasil jangka pendek yang diukur dengan standar akuntabilitas tradisional. Oleh karena itu, akuntabilitas mungkin bukan satu-satunya indikator keberhasilan dalam pengelolaan dana. Perspektif stewardship menekankan bahwa motivasi, kepercayaan, dan tujuan jangka panjang juga penting dalam menilai efektivitas pengelolaan (Agestina et al., 2023).

Hasil akhir ini konsisten dengan penelitian melalui Susanti (2019) yang juga menemukan bahwa pengelolaan bantuan operasional sekolah tidak dipengaruhi secara positif dan luas oleh akuntabilitas itu sendiri.

D. KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan penilaian garis regresi untuk menentukan dampak partisipasi, transparansi dan tanggung jawab terhadap efektivitas transportasi penyedia dan dana operasional perguruan tinggi (BOS).

Penelitian ini telah menghasilkan hasil bahwa partisipasi pemangku kepentingan, transparansi, dan tanggung jawab semuanya berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS secara bersamaan. Partisipasi pemangku kepentingan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas pengendalian dana BOS. Efektivitas pengendalian dana BOS

sangat dipengaruhi oleh transparansi, sedangkan akuntabilitas tidak memiliki dampak yang nyata dalam hasil akhir ini.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya ialah hasil penelitian hanya spesifik untuk Kabupaten Aceh Barat Daya dan mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke kabupaten/kota lain dengan sistem dan struktur sekolah yang berbeda. Tingkat pengaruh terhadap variabel dependen sangat kecil hanya sebesar 26,3 persen sehingga masih terdapat 73,7 persen faktor lain yang belum diteliti.

Saran

Berdasarkan evaluasi, dialog dan temuan penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam penelitian selanjutnya untuk memberikan konsekuensi yang lebih baik, yaitu memperluas jumlah observasi akan membantu dalam menentukan kemampuan perguruan tinggi di setiap lokasi dan memberikan pandangan yang lebih menyeluruh tentang efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional perguruan tinggi (BOS). Memanfaatkan variabel independen lainnya, termasuk partisipasi jaringan, partisipasi orang tua, karakteristik pengelola dana, dedikasi organisasi, dan penerapan tata kelola perguruan tinggi (GSG) yang tepat, yang dapat secara signifikan memengaruhi efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional perguruan tinggi (BOS).

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agestina, R., Pravasanti, Y. A., & Kristiyanti, L. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Pada SMA dan Sederajat di Kecamatan Simo. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 2(2), 349–
- Aulia, G. (2016). Partisipasi Stakeholder dalam Pelaksanaan Program Adiwiyata di SMP Negeri 4 Bojonegoro. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(3), 30–42.
- Ayu, H. C., Ferdian, T., & Nelvia, R. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik Terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di Kecamatan Rimbo Ulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 1(1), 132–145.
- Azkia, Nelsifa (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi stakeholder terhadap Efisiensi Pengelolaan Dana BOS pada SMAN dan SMKN di Aceh Singkil.
- Bere, S. M. (2021). Korupsi Dana BOS Rp 839 Juta, Kepala Sekolah dan Bendahara Ditetapkan Tersangka. *Kompas.Com*.

- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory:
- Kusumawati, E. (2023). Efektivitas Kerja Guru. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1487–1492.
- Laksono, A. T., & Putro, P. A. (2021). Rugikan Negara Rp2,3 M, Mantan Kepsek dan Staf SMKN 53 Jakbar Ditahan karena Korupsi Dana BOS. *TRIBUN- VIDEO.COM*.
- Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. UII Press.
- Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Andi Yogyakarta.
- Nupus, S. H. (2021). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Karakteristik Pengelola Keuangan Sekolah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus Pada Seluruh SMP/MTsN Di Kabupaten Aceh Tenggara).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 1 (2014).
- Prasetyowati, E. (2019). Analisis Pengaruh Partisipasi, Transparansi, Demokratis dan Saling Percaya terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)(Studi Kasus di SMA Negeri 1 Rumbia). *Jurnal Simplex*, 2(3).
- Purnomo, D. A. (2021). Kepala Sekolah Korupsi Dana BOS Rp 214 Juta, Sakit- sakitan Biar Diampuni. *Tribunnews.Com*.
- Putra, K. A. U., & Suryanawa, I. K. (2021). The Effect of Accountability and Transparency on Effectiveness of Government School Operational Assistance Funds Management. *European Journal of Business and Management Research*, 7(4), 108–115. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24018/ejbmr.2022.7.4.1364>.
- Rakhmawati, I. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 95–112.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian (6th ed.). Salemba Empat.
- Susanti, H. (2019). Penerapan Good School Governance (GSG) dan Pengaruhnya terhadap Efektifitas Pengelolaan Bantuan Operasional (BOS) Sekolah Dasar Kota Blitar. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(1), 165–175.

- Syahara, H., Wibowo, T. J. A., Fauziah, S. S., & Anwar, S. (2024). Implementasi dan Peran Teori Stewardship pada Konteks Penelitian Akuntansi: Studi Literatur. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4716–4734.
- Trisnawati, F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Madrasah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(1), 1–19.
- Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 1 (2003).
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 147 (2003).
- Widyatmoko, S. (2017). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD N Kemasari I Surakarta (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).